

**PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA REMBANG:
STUDI PEDAGANG NASI BUNGKUS**

*(The Profile of Pedagang Kaki Lima Within Fishermen
Society In Rembang: Study Of Packed Meal Sellers)*

Sri Mulyani Wahono *)

Abstract

The contribution given by sectors of trade especially pedagang kaki lima (packed meal sellers) in economic activity and citizens' prosperous (especially citizens' from weak economic segment) in Rembang, can be found within the coastal area society, that is fishermen society. The fact shows that Local Government. With the considerations to nature condition and its potentials, the maintenance of packed meal sellers' activity, has to be the environmental concepts. Therefore, the existence of packed meal sellers might be grown to be a productive and environmentally – concepted sector.

Keywords: *packed meal sellers, profile, informal, formal*

Abstrak

Kontribusi yang diberikan sektor usaha pedagang kaki lima (pedagang nasi bungkus) dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (terutama golongan masyarakat ekonomi lemah) kebetulan di kota Rembang ini terjadi pada masyarakat pesisir yaitu masyarakat nelayan cukup besar. Kenyataan itulah yang membuat perkembangan sektor informal ini semakin cepat. Perkembangan tersebut harus diperhatikan terutama oleh Pemerintah Daerah. Dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi yang ada tersebut, maka selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik pedagang kaki lima khususnya pedagang nasi bungkus yang banyak dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berwawasan lingkungan, sehingga keberadaannya dapat ditumbuhkembangkan menjadi sektor usaha yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: *Kaki lima, Profil, Informal, Formal*

*) *Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang*

1. Pendahuluan

Dewasa ini tuntutan otonomi tidak terelakkan lagi dan untuk menjawab tantangan yang ada telah lahir dua buah undang-undang, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan efektifnya selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan pada tanggal 19 Mei 1999 sampai dengan sekarang di era reformasi.

Tidak kalah pentingnya bagi pedagang kaki lima dalam era reformasi ini, adalah pedagang yang terabaikan keberadaannya, serta termarjinalkan oleh pemerintah. Padahal pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk usaha dalam sektor informal. Jenis usaha tersebut cukup menarik untuk dibahas, karena usaha tersebut mempunyai dua dampak yang berbeda yaitu dampak positif dan dampak negatif. Usaha pedagang kaki lima sering dijadikan kambing hitam dari penyebab kepadatan lalu lintas, kepadatan tempat maupun tidak bersihnya lingkungan (timbulnya pencemaran lingkungan) sehingga keadaan ini sangat mengganggu kebersihan atau keindahan pemandangan jalan.

Di lain pihak usaha tersebut ternyata keberadaannya sesuai dengan masyarakat ekonomi lemah. Usaha tersebut sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau *safely belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain itu juga menyediakan kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sehingga keberadaan pedagang kaki lima mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota serta mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam memberikan peluang kerja bagi pengangguran di kota. Selain sektor tersebut dipandang lebih mampu bertahan hidup *survive* atau tidak lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan.

2. Pembahasan

Dalam artikel ini, akan penulis jelaskan tentang pedagang kaki lima nasi bungkus untuk menjawab permasalahan dan pembahasan lebih lanjut, diantaranya yaitu sebagai berikut.

(1) Sektor informal

Menurut Hidayat dalam Suhartini (2001) sektor informal adalah sebagai berikut.

- a. Sektor informal adalah sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi pemerintah.
- b. Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak mempunyai akses) bantuan meskipun pemerintah telah menjanjikan.
- c. Sektor yang telah menerima bantuan tetapi bantuan itu belum sanggup membuat sektor itu berdikari

Jadi kriteria yang dipakai dalam definisi ini bukan ditekankan pada ada tidaknya bantuan melainkan lebih kepada aksesibilitas dan kualitas bantuan. Di Indonesia sektor informal menyerap kurang lebih 70% tenaga kerja. Sektor mempunyai kapasitas produksi yang rendah, karena pemupukan modal dan investasinya lemah. Dari sifatnya yang masih subsistem itulah, maka sektor informal dapat diartikan sebagai unit usaha usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan pada berbagai kendala seperti faktor modal, fisik, faktor pengetahuan dan faktor ketrampilan.

Dengan demikian istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Karena mereka yang terlihat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah, tidak terampil dan kebanyakan para imigran. Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapasitas yang mencari investasi yang menguntungkan dan bukan pula pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dalam menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.

Menurut C. Supartono dan Edi Rusdiyanto, (2000) perdagangan sektor informal dapat diartikan kelompok/ golongan yang usahanya berskala kecil, meliputi pedagang kaki lima, pemulung, usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud informal. Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

(2) Ciri-ciri Sektor Informal

Menurut Suhartini (2001) ada tujuh ciri pokok yang dimiliki sektor informal yaitu sebagai berikut.

- a. Kegiatan umumnya sederhana
- b. Skala usaha relatif kecil
- c. Sektor informal umumnya tidak mempunyai ijin usaha seperti halnya dalam bentuk Firma atau PT. (Perseroan Terbatas).
- d. Membuka usaha atau bekerja di sektor informal relatif mudah dari pada di perusahaan formal.
- e. Rendahnya tingkat penghasilan
- f. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil.
- g. Lambat laun kehidupan mereka terdorong ke pinggiran kota

Sedangkan ciri-ciri pokok yang dikemukakan oleh Hidayat dalam Suhartini (2001) adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- b. Pada umumnya tidak memiliki ijin usaha
- c. Pola kegiatan usaha tidak benar
- d. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- e. Satuan usaha yang mudah keluar masuk dari subsektor yang satu ke subsektor lain
- f. Teknologi yang dipakai masih sangat sederhana
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil
- h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan diperolehnya melalui pengalaman sambil bekerja.
- i. Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam *one man enterprise* (usaha mandiri) tenaga kerja berasal dari keluarga.

- j. Sumber modal pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang berpenghasilan menengah.

(3) Perbedaan Sektor Informal dan Formal

a. Sektor Formal

Jenis usaha di sektor formal, adalah jenis usaha yang resmi atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama tentang cara pendirian suatu usaha. Karena sifatnya yang resmi tersebut, maka cara memperoleh usahanya biasanya lebih mudah karena usaha di sektor formal dikelola secara profesional dan skala usahanya menengah ke atas. Sifat usaha sektor formal lebih tergantung pada perlindungan pemerintah dalam hal ini kebijakan ekonomi. Hubungan karyawan dengan pemilik usaha bersifat resmi yaitu berdasarkan kontak kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

b. Sektor Informal

Sektor informal merupakan jenis usaha yang bersifat kekeluargaan dan jenis usahanya berskala kecil. Sifat dari usaha sektor informal lebih mandiri jika dibandingkan dengan sektor formal, sehingga tidak terpengaruh adanya serikat kerja dan biasanya cara merekrut kerja disiplin yang masih berhubungan kerabat atau famili. Untuk lebih jelasnya, maka perbedaan antara sektor formal dan informal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perbedaan Sektor Informal dan Formal

Keterangan	Sektor Formal	Sektor Informal
1. Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
2. Teknologi	Pada modal	Padat Karya
3. Organisasi	Birokrasi	Menyerupai orang keluarga
4. Kredit	Dari lembaga keuangan resmi	Dari orang keluarga
5. Serikat Kerja	Sangat berperan	Tidak berperan
6. Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha.	Tidak ada
7. Sifat	Sangat tergantung pada perlindungan.	Berdikari
8. Persediaan Barang	Jumlah besar, kualitas baik	Jumlah kecil, kualitas berubah-ubah
9. Hubungan kerja majikan dengan pekerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan saling percaya

Sumber : Suhartini, tahun 2001

Pedagang nasi bungkus selalu di identifikasikan dengan usaha skala kecil, dan diklasifikasikan sebagai sektor informal. Lokasi usaha nasi bungkus di Rembang pada kenyataannya menyebar ke padar penduduk yaitu di alun-alun Rembang. Sebenarnya di alun-alun Rembang tidak hanya berjualan nasi bungkus, akan tetapi ada makanan lainnya dan barang. Namun demikian rata-rata yang ada di alun-alun Kota Rembang berjualan makanan siap saji. Dan yang berjualan sebagian adalah masyarakat Kota Rembang bertempat tinggal di daerah pesisir/ masyarakat nelayan.

Dipandang dari sisi ekonomi, profil perdagangan kaki lima dalam hal ini nasi bungkus mengisi struktur fungsi yang kosong dan diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah, sebagai tempat mencari barang dan jasa bagi konsumen, maupun sebagai tempat menawarkan barang dan jasa bagi konsumen. Secara umum, cara berjualan seperti ini masih ada kebutuhan. Fungsi untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu inilah berjualan nasi bungkus yang tidak akan dapat digantikan oleh supermarket, mall, departemen store, atau restoran dan toko-toko formal yang sudah ada. Bagi kelompok tertentu berjualan nasi bungkus dapat dijadikan perbandingan untuk makan ditempat lain. Karena di kaki lima kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Penuh ada pendapat bahwa keberadaan pabrik dengan produksi massal dan pengemasan barang dengan plastik dan lain-lain akan menghilangkan pedagang kaki lima nasi bungkus. Namun kenyataannya yang berubah hanya jenis barang dagangan. Pedagang nasi bungkus tidak semakin hilang, melainkan semakin berkembang dari sisi jenis barang dagangan dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan, atau penjual perantara bagi produsen rumahan.

Dipandang dari sisi perkembangan fisik kota atau penataan kota, perdagangan kaki lima yang berkembang tidak beraturan dan mengganggu fungsi jalan raya, pemakaian lahan yang tidak sah oleh sebagian besar pedagang, serta kurangnya mereka memperhatikan kebersihan tempat usaha merupakan kesalahan situasi yang perlu dikoreksi. Namun apa dan dari tingkat mana koreksi tersebut perlu dilakukan, serta tanggung jawab siapa, masih perlu dicari. Hal ini sangat penting karena masalah PKL adalah masalah tradisional di kota-kota tak terkecuali di Kota Rembang yang dapat juga terjadi di daerah lain, selalu muncul dan selalu ditangani dengan cara-cara yang sama, tetapi tidak pernah selesai. Yang diperlukan adalah memahami akar masalahnya, menemukan kunci strateginya, dan tindakan penanganan tidak hanya untuk mengobati gejalanya.

Banyak sisi kehidupan dan faktor perkembangan kota yang terkait dan diperkirakan menjadi titik strategis dalam upaya memahami masalah PKL. Faktor nyata yang terkait adalah : *over employment*, *over* urbanisasi, kemiskinan, keterbatasan lahan, pemanfaatan fungsi ruang yang berimpitan dan kemungkinan saling bertentangan, konflik sosial antar kelompok ekonomi, gangguan terhadap ruang politik tertentu, dan *overutilisasi* prasarana umum. Dari sisi ekonomi, PKL nasi bungkus menjadi penyelamat bagi masyarakat nelayan karena menampung pengangguran, memutar modal dalam bentuk usaha meskipun dengan cara yang informal. Pedagangnya merupakan wirausaha murni karena sifat informalnya menyebabkan tidak ada campur tangan pemerintah baik dalam bentuk bantuan kredit, bantuan tempat, maupun penarikan pajak resmi.

Dalam keterbatasan kapasitas tampung kota, mahalnya harga sewa tanah, semakin tingginya mobilitas penduduk, perkembangan modal transportasi secara kuantitas dan jenis, keberadaan perdagangan nasi bungkus terutama yang permanen dan semi permanen dapat dianggap sebagai kejahatan karena tidak mempunyai ijin usaha yang sah secara aturan, mencuri ruang publik, memperburuk tingkat kemacetan jalan raya, mencemari lingkungan, dan merusak wajah kota. Lebih lagi bila cara perdagangan yang disalahgunakan untuk perdagangan bawah tanah antara lain

peredaran barang ilegal seperti judi togel, uang palsu, pelacuran terselubung, narkoba, penyelundupan senjata, dll. Kelompok PKL sering dijadikan lahan penarikan pajak gelap oleh kelompok preman, dan kadang secara sengaja dipelihara keberadaannya oleh pihak tertentu untuk dijadikan obyek “pendapatan”.

Satu hal yang menarik dari Kota Rembang adalah para PKL belum diwadahi secara resmi seperti yang terjadi di Kota Semarang yang telah diwadahi resmi oleh kelurahan, dan jumlahnya dipantau secara berkala. Dan ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah. Agar peran profil PKL nasi bungkus yang dikembangkan masyarakat nelayan Kota Rembang keberadaannya tetap exis dan makin berkembang. Secara tidak langsung akan meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat apabila dikelola secara benar dan tepat. Karena para pembeli tentunya tidak hanya dari pejalan kaki akan tetapi dari pembeli yang mengendarai sepeda motor dan bahkan mobil.

3. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profil penjual nasi bungkus yang dikembangkan oleh masyarakat nelayan, alangkah baiknya ditata dan didata oleh Pemerintah Daerah dan dapat dijadikan asset daerah, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan PAD dan mengurangi pengangguran. Dengan bertambahnya jumlah penduduk daerah pesisir atau kawasan masyarakat nelayan, ini merupakan potensi yang harus dipertahankan dan dikembangkan.

Pemerintah Daerah tinggal memberikan evaluasi-evaluasi sebagai instansi yang mempunyai wewenang serta kebijakan agar perkembangan pedagang kaki lima nantinya tidak membuat kotor wajah kota Rembang. Selain itu di kawasan Alun-alun kota Rembang perkembangan pedagang kaki lima nasi bungkus dimungkinkan akan mendatangkan dampak positif apabila dihubungkan dengan kawasan Taman Pantai Kartini karena jaraknya tidak terlalu jauh.

Daftar Pustaka

- Harsiwi, A.M 2003. *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima*, [Http/artikel.a.s/ A.M Harsiwi](http://artikel.a.s/A.M%20Harsiwi).
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1985 *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informasi di Kota*. Jakarta: Gramedia,
- Noer Effendi, Tadjuddin, 1995, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. . Yogyakarta :Tiara Wacana,.
- Suartini, 2001. *Analisis Profil Pedagang Kaki Lima dan Pemasarannya*. Skripsi yang tidak di Publikasikan : Studi Kasus di Pasar Kliwon Kudus, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Supartono, C dan Edi Rusdiyanto. 2000. *Profil Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pinggiran Perkotaan..* [Http/202.159.18.43/jsi/112 Supartono.htm](http://202.159.18.43/jsi/112%20Supartono.htm).